



## Local Wisdom Sebagai Penguat Implementasi *Good University Governance* Perguruan Tinggi Swasta di Kabupaten Jayawijaya

Nur Aini<sup>1\*</sup>, Akbar Silo<sup>1</sup>, Untung Muhdiarta<sup>1</sup>, Hiskia C.M Sapioper<sup>1</sup>, Vestus Febrian Aristoteles Jawan<sup>2</sup>

<sup>1</sup> Program Doktor Ilmu Sosial Program Pascasarjana Universitas Cenderawasih, Indonesia

<sup>2</sup> Program Studi Administrasi Publik, Universitas Amal Ilmiah Yapis Wamena, Indonesia

\* E-mail Korespondensi Penulis: [ainimuhtadi@gmail.com](mailto:ainimuhtadi@gmail.com)

### ARTICLE INFO

#### **Keywords:**

Local Wisdom, Strengthening Implementation, Good University Governance, Jayawijaya, Papua Pegunungan

#### **How to Cite:**

Aini, N. Silo, A., Muhdiarta, U., Sapioper, H.C.M., Jawan, V. F. A. (2026). Local Wisdom Sebagai Penguatan Implementasi Good University Governance Pada Perguruan Tinggi Swasta di Kabupaten Jayawijaya. *Jurnal Ekologi Birokrasi*, 14(1): 10-19.

#### **DOI:**

10.31957/jeb.v14i3.5651

### ABSTRACT

*The main problem of this research is the low quality of student services in private universities in Jayawijaya Regency due to the suboptimal implementation of good university governance. This study aims to analyze the implementation of governance, identify inhibiting factors, and explore the role of local wisdom in strengthening governance. The method used is descriptive qualitative with data collection through in-depth interviews, observation, and documentation. Research participants included leaders, staff, lecturers, students, and alumni. Data analysis used the Miles and Huberman model with source triangulation for validity. The results of the study indicate that the integration of local wisdom significantly increases transparency, accountability, and stakeholder participation, strengthens governance implementation, and improves the quality of student services, becoming a relevant adaptive strategy for universities in the 3T region.*

Copyright © 2025 JEB. All rights reserved.

---

**INFO ARTIKEL**

**Kata Kunci:**

*Local Wisdom, Penguatan Implementasi, Good University Governance, Jayawijaya, Papua Pegunungan*

**Cara Mengutip:**

Aini, N. Silo, A., Muhdiarta, U., Sapioper, H.C.M., Jawan, V. F. A. (2026). Local Wisdom Sebagai Penguatan Implementasi Good University Governance Pada Perguruan Tinggi Swasta di Kabupaten Jayawijaya. *Jurnal Ekologi Birokrasi*, 14(1): 10-19.

**DOI:**

10.31957/jeb.v14i1.5329

---

**ABSTRAK**

Permasalahan utama penelitian ini adalah rendahnya kualitas layanan mahasiswa di perguruan tinggi swasta Kabupaten Jayawijaya akibat implementasi good university governance yang belum optimal. Penelitian ini bertujuan menganalisis implementasi governance, mengidentifikasi faktor penghambat, dan menggali peran local wisdom dalam memperkuat tata kelola. Metode yang digunakan adalah kualitatif deskriptif dengan pengumpulan data melalui wawancara mendalam, observasi, dan dokumentasi. Partisipan penelitian meliputi pimpinan, staf, dosen, mahasiswa, dan alumni. Analisis data menggunakan model Miles dan Huberman dengan triangulasi sumber untuk validitas. Hasil penelitian menunjukkan bahwa integrasi local wisdom secara signifikan meningkatkan transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi stakeholder, memperkuat implementasi governance, serta meningkatkan mutu layanan mahasiswa, menjadi strategi adaptif yang relevan untuk perguruan tinggi di wilayah 3T.

*Hak Cipta© 2025 JEB. Seluruh Hak Cipta.*

---

**1. Pendahuluan**

Permasalahan dalam good university governance pada perguruan tinggi swasta di Kabupaten Jayawijaya menunjukkan tantangan nyata berupa rendahnya mutu pelayanan kepada mahasiswa, yang tercermin dari praktik tata kelola institusi yang belum optimal dalam transparansi, akuntabilitas, dan responsivitas, sehingga menciptakan ketidakpuasan mahasiswa terhadap layanan akademik dan administratif. Fakta ini mengindikasikan bahwa masih terdapat kesenjangan signifikan antara tujuan ideal tata kelola perguruan tinggi dengan realitas praktik di lapangan, terutama di wilayah 3T (tertinggal, terdepan, terluar) seperti Jayawijaya, di mana keterbatasan sumber daya dan partisipasi stakeholders memperparah efektivitas implementasi governance yang baik. Dalam konteks pelayanan mahasiswa, keterbatasan struktur manajemen serta kurangnya dukungan terhadap mekanisme tanggapan dan umpan balik mengakibatkan belum optimalnya pencapaian kepercayaan publik dan standar mutu institusi. Studi ini membahas bagaimana keterbatasan kompetensi dalam jaminan mutu (QA) dan mekanisme umpan balik memengaruhi kepercayaan publik dan kualitas institusi di perguruan tinggi Oman (Qureshi, H.G., et al : 2026). Kondisi tersebut bukan hanya berdampak pada persepsi mahasiswa terhadap kualitas layanan tetapi juga menghambat pencapaian target akreditasi dan reputasi institusi secara keseluruhan.

Literatur menunjukkan bahwa good university governance adalah kerangka tata kelola pendidikan tinggi yang mengintegrasikan prinsip-prinsip transparansi, akuntabilitas, tanggung jawab, kesetaraan, dan partisipasi pemangku kepentingan untuk meningkatkan kinerja institusi dan pelayanan publik pendidikan (Sudarmanto et

al. 2025). Prinsip-prinsip tersebut menjadi landasan teoritik yang sering digunakan untuk mengevaluasi governance di perguruan tinggi karena berkontribusi terhadap kualitas layanan, efektivitas manajemen, dan akuntabilitas institusi (Khairunisa et al. 2025). Namun demikian, studi empiris masih menunjukkan adanya kesenjangan antara implementasi prinsip governance yang ideal dengan praktik nyata di perguruan tinggi, terutama di konteks perguruan tinggi swasta di daerah kurang berkembang seperti Jayawijaya, di mana tantangan koordinasi kelembagaan, budaya organisasi, dan sumber daya masih menjadi penghambat utama (Hardiyanti et al. 2026). Literatur juga mengungkapkan bahwa penerapan prinsip tata kelola di lingkungan pendidikan tinggi cenderung bersifat umum dan kurang terintegrasi dengan nilai lokal yang dapat mempengaruhi efektivitas implementasinya.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis secara mendalam implementasi model good university governance pada perguruan tinggi swasta di Kabupaten Jayawijaya, termasuk mengidentifikasi faktor-faktor penghambat yang memengaruhi efektivitas praktik tata kelola tersebut dalam meningkatkan mutu pelayanan mahasiswa. Tujuan lain adalah untuk menggali bagaimana prinsip-prinsip tata kelola pendidikan tinggi tersebut diterapkan dalam konteks nyata dengan keterbatasan sumber daya dan tantangan struktur kelembagaan, sehingga menghasilkan rekomendasi yang bersifat kontekstual dan aplikatif. Dengan pendekatan kualitatif deskriptif melalui wawancara multi-stakeholder, observasi, dan dokumentasi, penelitian ini diharapkan mampu menjelaskan hubungan antara prinsip tata kelola yang ideal dan praktik aktual, serta pemahaman partisipan terhadap indikator layanan mahasiswa berbasis pengalaman langsung. Penelitian ini juga mengidentifikasi kesenjangan antara teori dan praktik tata kelola, serta menyediakan gambaran faktor budaya organisasi dan partisipasi stakeholders yang dapat menjadi basis rekomendasi kebijakan maupun perbaikan internal institusi. Dengan demikian, penelitian diharapkan dapat memberikan kontribusi empiris dalam menguatkan literatur mengenai governance di perguruan tinggi swasta di wilayah 3T.

Penelitian ini penting dilakukan karena praktik good university governance yang efektif berpengaruh langsung terhadap kualitas layanan yang dirasakan mahasiswa, serta merupakan indikator penting dalam pencapaian kepercayaan publik dan akreditasi institusi di lingkungan perguruan tinggi Indonesia (Khairunisa et al. 2025). Selain itu, tantangan implementasi di wilayah 3T seperti Jayawijaya termasuk kelemahan partisipasi stakeholders, budaya organisasi yang belum menjunjung transparansi, dan keterbatasan sumber daya menunjukkan bahwa model governance yang ada belum mampu menjawab kebutuhan kontekstual di level lokal (Hardiyanti et al. 2026). Argumen ini diperkuat oleh temuan literatur yang menggarisbawahi bahwa pendekatan tata kelola harus disesuaikan dengan karakteristik budaya lokal dan kondisi institusional untuk mencapai efektivitas yang nyata, sehingga penelitian ini menjadi relevan sebagai usaha mempersempit kesenjangan antara teori governance dan praktik di lapangan. Penelitian ini juga berpotensi memperkaya literatur keilmuan di rumpun ilmu sosial serta memberikan dasar konseptual dan praktis bagi pengembangan kebijakan tata kelola di perguruan tinggi swasta dengan konteks serupa.

## **2. Metode Penelitian**

Penelitian ini berfokus pada fenomena implementasi good university governance dalam konteks perguruan tinggi swasta di Kabupaten Jayawijaya, yang menjadi objek utama kajian. Fenomena yang dikaji mencakup praktik tata kelola

institusi, termasuk transparansi, akuntabilitas, partisipasi stakeholders, dan kualitas pelayanan mahasiswa, yang menjadi indikator keberhasilan penerapan prinsip-prinsip governance. Observasi awal menunjukkan adanya kendala struktural, budaya organisasi yang masih hierarkis, serta keterbatasan sumber daya yang memengaruhi efektivitas implementasi governance secara menyeluruh. Kasus ini dipilih karena representatif untuk mengilustrasikan tantangan yang dihadapi perguruan tinggi swasta di daerah 3T dalam mengoptimalkan kualitas layanan akademik. Fokus pada fenomena ini diharapkan dapat memberikan pemahaman mendalam tentang mekanisme tata kelola yang diterapkan, faktor penghambat, serta strategi adaptif yang digunakan institusi dalam menghadapi keterbatasan sumber daya dan tekanan regulasi eksternal. Penelitian berupaya menangkap nuansa praktik sehari-hari yang dialami oleh pimpinan, staf, mahasiswa, dan alumni, sehingga menghasilkan gambaran yang komprehensif mengenai kondisi nyata governance di lapangan. (Setiowati et al., 2023)

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif, yang berfokus pada penggambaran mendetail fenomena tanpa melakukan manipulasi variabel atau prediksi kausal, dengan tujuan memberikan pemahaman yang jelas dan komprehensif mengenai situasi penelitian. Data primer diperoleh melalui wawancara mendalam dengan informan yang berperan langsung dalam praktik tata kelola institusi, membahas aspek implementasi prinsip-prinsip governance, partisipasi civitas akademika, serta hambatan yang ditemui dalam pelayanan mahasiswa. Sedangkan data sekunder mencakup literatur akademik terkait good university governance, model tata kelola perguruan tinggi, dan best practices di konteks Indonesia, yang digunakan untuk memperkuat analisis fenomena dan membandingkan praktik aktual dengan kerangka teori. Pendekatan ini memungkinkan penelitian menangkap pengalaman, persepsi, dan praktik nyata yang terjadi di lapangan, serta menyajikan interpretasi yang berlandaskan bukti empiris, sehingga menghasilkan pemahaman kontekstual yang kuat terhadap fenomena yang diteliti. (Samsuri et al., 2025)

Partisipan penelitian terdiri dari 9 informan yang dipilih secara purposive untuk mewakili seluruh lapisan organisasi dan pemangku kepentingan. Informan meliputi pimpinan perguruan tinggi, wakil rektor, dekan, kepala lembaga, kaprodi, mahasiswa, alumni, tenaga kependidikan, dan dosen. Pemilihan partisipan bertujuan untuk memperoleh perspektif multi-stakeholder terkait implementasi governance, termasuk pengalaman langsung mahasiswa dan alumni mengenai kualitas layanan, serta pandangan staf dan pimpinan terhadap kendala struktural dan budaya organisasi. Keterlibatan berbagai peran ini memungkinkan triangulasi informasi yang kuat, sehingga data yang diperoleh lebih valid dan mencerminkan kondisi nyata di lapangan. Penggunaan wawancara mendalam sebagai teknik utama memungkinkan peneliti menelusuri persepsi, sikap, dan praktik informan secara rinci, sementara observasi dan dokumentasi memberikan bukti tambahan yang mendukung analisis. (Noviani et al., 2023)

Proses penelitian dilakukan melalui beberapa tahapan yang sistematis, dimulai dari identifikasi fenomena dan perencanaan pengumpulan data, pengumpulan data melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi, hingga analisis tematik. Wawancara dilakukan dengan pedoman semi-terstruktur untuk menelusuri pengalaman dan persepsi informan terkait implementasi governance dan hambatan yang ditemui. Observasi diarahkan pada perilaku civitas akademika dalam menjalankan prinsip governance, termasuk interaksi antar unit, partisipasi mahasiswa, serta penerapan mekanisme evaluasi layanan. Dokumentasi meliputi peraturan institusi, rencana strategis, dan catatan kegiatan akademik yang relevan. Teknik pengumpulan ini

memungkinkan peneliti memperoleh data yang kaya, kontekstual, dan triangulatif, sehingga analisis dapat dilakukan dengan mempertimbangkan berbagai sumber informasi untuk meningkatkan validitas temuan. (Setiowati et al., 2023)

Analisis data dilakukan menggunakan model Miles and Huberman, yang terdiri dari tiga tahap utama: reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan, diikuti verifikasi data melalui triangulasi sumber. Reduksi data meliputi pemilahan informasi relevan dari transkrip wawancara, catatan observasi, dan dokumen institusi. Penyajian data dilakukan secara tematik untuk mengorganisasi informasi dan memudahkan interpretasi fenomena. Penarikan kesimpulan dilakukan dengan mengidentifikasi pola, hubungan, dan faktor penghambat implementasi governance. Verifikasi data melalui triangulasi sumber, yaitu membandingkan informasi dari berbagai partisipan dan dokumentasi, memastikan keakuratan dan objektivitas temuan. Pendekatan ini menghasilkan analisis yang komprehensif mengenai praktik governance, hambatan implementasi, dan strategi adaptif yang diterapkan, serta memberikan dasar empiris bagi rekomendasi peningkatan kualitas layanan mahasiswa di perguruan tinggi swasta. (Hamid et al., 2023).

### **3. Hasil dan Pembahasan**

#### **Hasil**

Berdasarkan hasil wawancara, observasi, dan dokumentasi, praktik local wisdom di perguruan tinggi swasta di Kabupaten Jayawijaya terlihat pada bagaimana institusi menyesuaikan tata kelola dan layanan akademik dengan nilai budaya dan kearifan lokal masyarakat. Hal ini tercermin dalam prosedur pengambilan keputusan yang melibatkan musyawarah dengan tokoh lokal, kebijakan akademik yang mempertimbangkan konteks sosial budaya mahasiswa, serta penerapan tradisi lokal dalam program pembelajaran. Penerapan local wisdom juga tercermin dalam penyesuaian jadwal kegiatan akademik agar sesuai dengan kalender adat, serta dalam bentuk penghargaan terhadap adat istiadat yang meningkatkan rasa memiliki mahasiswa terhadap institusi. Dengan cara ini, universitas berusaha mengintegrasikan prinsip governance modern dengan kearifan lokal agar penerapannya lebih diterima dan relevan secara sosial.

"Sistem evaluasi yang ada cukup terbatas. Sebaiknya ada sistem yang lebih jelas dan melibatkan mahasiswa dalam memberikan umpan balik untuk meningkatkan kualitas layanan." (Resp.9)

Eksplanasi data menunjukkan bahwa penerapan local wisdom menjadi mekanisme adaptasi institusi terhadap kondisi sosial budaya setempat. Dengan mengintegrasikan nilai lokal ke dalam pengambilan keputusan dan pelayanan, perguruan tinggi mampu meningkatkan partisipasi civitas akademika dan legitimasi kebijakan institusi. Hal ini sejalan dengan literatur yang menyebut bahwa integrasi kearifan lokal dalam tata kelola universitas mendukung keberlanjutan praktik governance serta meningkatkan penerimaan mahasiswa terhadap kebijakan akademik dan administratif. Penerapan ini tidak hanya menjaga relevansi sosial institusi, tetapi juga memperkuat identitas institusi sebagai lembaga yang responsif terhadap lingkungan lokal dan kebutuhan stakeholder.

Relasi antara deskripsi dan eksplanasi data dengan realitas masalah penelitian menunjukkan bahwa local wisdom berfungsi sebagai penguat implementasi governance di tengah keterbatasan sumber daya dan tantangan budaya organisasi.

Penggunaan nilai lokal dalam proses governance membantu institusi mengatasi hambatan partisipasi mahasiswa dan staf, meningkatkan efektivitas layanan, dan menciptakan mekanisme evaluasi yang lebih inklusif. Dengan demikian, penerapan local wisdom berperan strategis dalam menjembatani kesenjangan antara teori good university governance dan praktik di lapangan, khususnya di wilayah 3T.

Hasil wawancara, observasi, dan dokumentasi menunjukkan upaya penguatan implementasi good university governance di perguruan tinggi swasta Jayawijaya melalui peningkatan transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi stakeholder. Penguatan ini diwujudkan dalam penyusunan SOP yang lebih jelas, mekanisme evaluasi kinerja yang melibatkan mahasiswa dan staf, serta peningkatan komunikasi internal dan eksternal. Observasi lapangan juga menunjukkan adanya program pelatihan bagi dosen dan tenaga kependidikan untuk memahami prinsip-prinsip governance, sehingga kapasitas institusi dalam menerapkan kebijakan lebih terstruktur dan berorientasi pada pelayanan mahasiswa yang berkualitas.

"Yang saya lihat evaluasi yang ada lebih berfokus pada administrasi internal saja. Perlu ada evaluasi yang lebih menyeluruh agar pelayanan mahasiswa meningkat." (Resp.2)

Eksplanasi data mengindikasikan bahwa penguatan implementasi governance menjadi kunci dalam memastikan prinsip transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi stakeholder berjalan efektif. Upaya ini membantu institusi mengatasi hambatan dalam struktur kelembagaan dan budaya organisasi yang hierarkis, sehingga pengambilan keputusan lebih inklusif dan responsif. Literatur mendukung temuan ini, yang menunjukkan bahwa penguatan kapasitas internal institusi melalui pelatihan, SOP, dan evaluasi partisipatif meningkatkan kualitas layanan mahasiswa dan legitimasi kebijakan institusi di mata civitas akademika.

Relasi antara deskripsi dan eksplanasi data dengan masalah penelitian menggarisbawahi bahwa penguatan implementasi good university governance secara sistematis memperbaiki kinerja institusi dalam menyediakan layanan akademik dan administratif yang memadai. Penerapan mekanisme evaluasi partisipatif dan SOP yang jelas memungkinkan universitas menghadapi keterbatasan sumber daya dan meningkatkan efektivitas governance, sehingga relevan dengan upaya meningkatkan mutu layanan mahasiswa dan kepercayaan publik.

Berdasarkan wawancara, observasi, dan dokumentasi, praktik good university governance meliputi transparansi informasi, akuntabilitas, dan partisipasi civitas akademika dalam pengambilan keputusan. Penerapan prinsip-prinsip ini tampak dalam proses perencanaan akademik, evaluasi kinerja, dan mekanisme pelaporan yang sistematis. Dokumentasi menunjukkan bahwa universitas telah menerapkan regulasi internal dan program monitoring untuk mendukung penerapan governance yang baik, meskipun masih terdapat tantangan dalam konsistensi penerapan di tingkat fakultas dan program studi.

"Transparansi informasi menjadi variabel paling signifikan berpengaruh terhadap kinerja institusi. Namun, implementasinya masih belum merata di semua fakultas." (Resp.4)

Eksplanasi data menekankan bahwa penerapan good university governance secara konsisten memengaruhi efektivitas dan efisiensi manajemen institusi. Dengan mekanisme transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi yang dioptimalkan, universitas dapat memonitor kinerja unit kerja, mengidentifikasi hambatan, dan menyesuaikan strategi kebijakan untuk meningkatkan mutu layanan mahasiswa. Temuan ini sesuai

dengan literatur yang menekankan pentingnya konsistensi penerapan prinsip governance untuk mencapai kualitas institusi yang berkelanjutan.

Relasi antara deskripsi dan eksplanasi dengan realitas masalah penelitian menunjukkan bahwa penerapan good university governance secara menyeluruh menjadi dasar penguatan kualitas pelayanan mahasiswa dan legitimasi institusi. Prinsip-prinsip governance berfungsi untuk mengatasi hambatan struktural, memperkuat partisipasi civitas akademika, dan meningkatkan akuntabilitas lembaga, sehingga hasilnya relevan dengan kebutuhan perguruan tinggi swasta di wilayah 3T untuk mencapai mutu layanan yang lebih baik dan kepercayaan publik yang tinggi.

## **Pembahasan**

Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan local wisdom dalam governance perguruan tinggi swasta di Jayawijaya berperan sebagai kerangka adaptif untuk memperkuat implementasi good university governance dan meningkatkan mutu layanan mahasiswa. Integrasi nilai-nilai lokal dalam pengambilan keputusan dan prosedur akademik memungkinkan institusi mengatasi keterbatasan sumber daya dan hambatan budaya organisasi. Penguatan implementasi governance terlihat melalui SOP yang jelas, evaluasi kinerja partisipatif, dan pelatihan civitas akademika, sehingga meningkatkan akuntabilitas, transparansi, dan partisipasi stakeholder. Selain itu, governance yang baik diterapkan melalui mekanisme monitoring yang konsisten, meskipun penerapannya masih belum merata di seluruh fakultas dan program studi. Temuan ini menegaskan relevansi penerapan good university governance yang disesuaikan dengan konteks lokal untuk meningkatkan efektivitas dan legitimasi layanan akademik di wilayah 3T.

Dibandingkan dengan studi sebelumnya, penelitian ini menambah dimensi kontekstual dengan menyoroti integrasi local wisdom dalam tata kelola universitas. Misalnya, penelitian oleh Hajido et al. (2025) menekankan perlunya keseimbangan antara struktur dan fleksibilitas dalam governance ASEAN, namun tidak menekankan integrasi nilai budaya lokal dalam pengambilan keputusan. Sementara itu, penelitian Hartati et al. (2018) menunjukkan pengaruh good university governance terhadap kualitas SDM dan layanan universitas, tetapi kurang fokus pada mekanisme adaptasi lokal. Dengan demikian, penelitian ini menunjukkan keunggulan dengan menyajikan bukti empiris bagaimana local wisdom mendukung penguatan governance dalam konteks sumber daya terbatas, menjawab gap pada literatur sebelumnya yang masih terbatas pada universitas besar atau negeri di wilayah metropolitan. (Hajido et al., 2025)

Refleksi terhadap hasil penelitian menunjukkan bahwa integrasi local wisdom dalam governance tidak hanya meningkatkan kualitas layanan mahasiswa, tetapi juga memperkuat legitimasi institusi di mata civitas akademika dan masyarakat. Dengan pendekatan deskriptif kualitatif yang menekankan pengalaman langsung mahasiswa, alumni, dan staf, penelitian ini memberi pemahaman mendalam tentang bagaimana prinsip governance diterapkan dalam konteks nyata. Manfaat penelitian ini terlihat dalam kemampuan institusi merespons kebutuhan mahasiswa secara adaptif, memperkuat partisipasi stakeholder, serta meningkatkan efektivitas monitoring dan evaluasi internal. Dengan demikian, penelitian ini menjadi dasar empiris bagi kebijakan perbaikan layanan akademik yang lebih relevan secara lokal.

Hasil penelitian memiliki implikasi praktis dan teoretis. Secara praktis, universitas swasta di daerah 3T dapat memanfaatkan local wisdom sebagai strategi untuk memperkuat tata kelola dan meningkatkan kualitas layanan mahasiswa. Hal ini

mencakup penyesuaian prosedur akademik, mekanisme evaluasi partisipatif, dan pelatihan staf berbasis konteks lokal. Secara teoretis, penelitian ini memperluas literatur *good university governance* dengan menekankan peran kearifan lokal sebagai variabel yang mendukung efektivitas *governance*, sehingga model tata kelola universitas di Indonesia dapat dikembangkan dengan mempertimbangkan faktor kontekstual yang spesifik untuk setiap daerah. (Nazaruddin et al. 2025)

Hasil penelitian mencerminkan kondisi nyata perguruan tinggi di wilayah 3T yang menghadapi keterbatasan sumber daya, struktur organisasi yang hierarkis, dan rendahnya partisipasi mahasiswa dalam proses *governance*. Penguatan *governance* melalui integrasi *local wisdom* berhasil karena menyesuaikan praktik institusi dengan norma sosial dan budaya lokal, sehingga memperoleh legitimasi dan kepatuhan dari *civitas akademika*. Fenomena ini konsisten dengan temuan Arifin et al. (2019), yang menegaskan bahwa implementasi *governance* di tingkat lokal akan lebih efektif apabila diselaraskan dengan nilai-nilai lokal yang berlaku. Dengan demikian, faktor kultural dan sosial menjadi determinan penting dalam efektivitas penerapan prinsip *governance*.

Berdasarkan hasil penelitian, universitas swasta sebaiknya mengambil langkah-langkah konkret untuk memperkuat *governance*, termasuk: standarisasi SOP yang tetap fleksibel dengan konteks lokal, mekanisme evaluasi partisipatif bagi mahasiswa dan staf, pelatihan berkala untuk peningkatan kapasitas *civitas akademika*, serta monitoring dan evaluasi penerapan *governance* di seluruh fakultas dan program studi. Selain itu, kolaborasi dengan komunitas lokal dan tokoh adat dapat memperkuat legitimasi kebijakan dan memfasilitasi penerapan *good university governance* secara berkelanjutan, sehingga institusi mampu menghadirkan layanan mahasiswa yang berkualitas, akuntabel, dan responsif terhadap tantangan lokal. (Fadrial et al., 2024).

#### **4. Kesimpulan**

Penelitian ini menemukan hal yang cukup mengejutkan: penerapan *local wisdom* dalam tata kelola perguruan tinggi swasta di Kabupaten Jayawijaya tidak hanya sekadar melengkapi prinsip *good university governance*, melainkan secara signifikan menjadi penggerak utama peningkatan kualitas layanan mahasiswa. Integrasi nilai-nilai lokal dalam pengambilan keputusan, prosedur akademik, dan interaksi *civitas akademika* terbukti memperkuat legitimasi kebijakan institusi, meningkatkan partisipasi stakeholder, serta menciptakan mekanisme evaluasi yang inklusif dan adaptif. Temuan ini menegaskan bahwa kearifan lokal dapat berfungsi sebagai katalisator bagi efektivitas *governance*, terutama di wilayah 3T dengan keterbatasan sumber daya dan tantangan budaya organisasi, yang sebelumnya jarang mendapat perhatian dalam literatur pendidikan tinggi di Indonesia.

Nilai lebih penelitian ini terlihat dari sumbangan terhadap pengembangan keilmuan, baik secara teoritis maupun praktis. Secara teoritis, penelitian ini memperluas pemahaman mengenai *good university governance* dengan menekankan peran *local wisdom* sebagai variabel yang mempengaruhi efektivitas tata kelola, sehingga memperkaya literatur *governance* yang selama ini dominan pada konteks universitas besar atau negeri. Secara praktis, temuan ini memberikan panduan bagi perguruan tinggi swasta, khususnya di wilayah 3T, dalam merancang strategi *governance* yang responsif terhadap kebutuhan mahasiswa dan konteks lokal, termasuk mekanisme evaluasi partisipatif, SOP fleksibel berbasis budaya lokal, dan program pelatihan *civitas akademika* yang terintegrasi dengan nilai-nilai lokal.

Meskipun memberikan wawasan yang mendalam, penelitian ini memiliki keterbatasan dalam hal generalisasi temuan karena fokusnya terbatas pada perguruan tinggi swasta di Kabupaten Jayawijaya. Keterbatasan ini justru menjadi arahan penting bagi penelitian selanjutnya, yang dapat memperluas cakupan studi ke berbagai daerah 3T lainnya, membandingkan penerapan governance di konteks urban dan rural, atau mengintegrasikan pendekatan kuantitatif untuk menilai efektivitas local wisdom dalam tata kelola secara lebih sistematis. Selain itu, penelitian selanjutnya dapat mengeksplorasi hubungan antara governance berbasis kearifan lokal dengan outcome akademik dan kepuasan mahasiswa secara longitudinal, sehingga dapat memberikan rekomendasi kebijakan yang lebih komprehensif bagi pengembangan perguruan tinggi swasta di Indonesia.

### **Daftar Pustaka**

- Arifin, R., Muhtada, D., & Sri Utari, I. (2019). Preserving Local Wisdoms for Village Good Governance Management in Industry 4.0 Era (Study of North Coastal Area, Central Java, Indonesia). In *Proceedings of First International Conference on Culture, Education, Linguistics and Literature, CELL*.
- Fadrial, R., Simanjuntak, H. T. R. F., & Wirman, W. (2024). A qualitative study on the influencing factors of e-government adoption to improve public trust in local government: Case study of Rokan Hulu municipality. *The Indonesian Journal of Computer Science, 13*(3).
- Hajido, N., Wiyono, B. B., Burhanuddin, & Imron, A. (2025). Comparative analysis of governance models in ASEAN higher education: Balancing structure and adaptability. *Journal of Information Systems Engineering & Management*, <https://doi.org/10.52783/jisem.v10i29s.4589>
- Hamid, A. Y. S., Permatasari, H., Hargiana, G., Rahmadiyah, D. C., & Putri, A. F. (2024). Socio-cultural factors influencing Indonesian nurses to stay working in Indonesia: A qualitative study. *International Nursing Review, 71*(1), 69-76.
- Hardiyanti, Y. M., Faradiba, A. A., Yuniarti, E., Wenda, N., & Wenda, E. (2026). Urban Revitalisasi dan Transformasi Perkotaan Kawasan 3T di Kabupaten Jayawijaya: Pendekatan Ekonomi Berkelanjutan Berdasarkan RPJMD Provinsi Papua Pegunungan. *Jurnal Teknologi Lingkungan Lahan Basah, 14*(1), 426-443.
- Hartati, N., Muktiyanto, A., & Hadiwidjaja, R. D. (2018). The Influence of Good University Governance on Human Capital. *Acc. Fin. Review, 3*(1), 01-08. <https://ssrn.com/abstract=3147771>
- Khairunisa, T., Herdo, R. L., Mufid, Z. I., Santika, C. D., Anggraini, M., & Aryani, F. (2025). Good University Governance dan Kinerja Perguruan Tinggi. *Journal of Student Research, 3*(4), 45-58. <https://doi.org/10.55606/jsr.v3i1.3535>
- Nazaruddin, N., Yani, A., Muslem, M., Jafaruddin, J., Muryali, M., & Alfiady, T. (2025). Revitalisasi Nilai Governance Samudera Pasai Berbasis Bukti Arkeologis: Strategi Penguatan Identitas Lokal Dan Inspirasi Tata Kelola Pembangunan Daerah. *Jurnal Pengabdian Masyarakat Bangsa, 3*(10), 5157-5166.
- Noviani, W., Suprabowo, I., Purnamasari, V., & Chong, M. C. (2023). Brand image of Islamic characters perceived by private higher education institution students

- in Indonesia. *Open Access Macedonian Journal of Medical Sciences*, 11(E), 80-88.
- Qureshi, H. G., Wahab, S. A., Al-Manthari, H. M. A., & Manickam, T. (2026). Building a sustainable quality culture in Omani HEIs: a case study of staff perceptions of QA in UTAS branches. *Quality Assurance in Education*, 1-18.
- Riana, K. E., & Hadiwidjaja, R. D. (2024). Good university governance to universities performance: Systematic literature review. *Eduvest-Journal of Universal Studies*, 4(5), 4229-4243.
- Rusdi, M., Sartika, D., Putra, I., & Sari, N. (2023). Quality governance design good university governance in the education sector: A literature review of concepts performance models and audit practices from a risk management perspective. *International Journal of Humanities Education and Social Sciences (IJHESS)*, 3(3).
- Samsuri, T., Widiana, I. W., Lasmawan, I. W., & Suharta, I. G. P. (2025). Transforming Higher Education Curriculum Based on the Indonesian National Qualifications Framework (KKNI) to Address Human Re-source Challenges in the Industrial Revolution 4.0 Era. *Path of Science*, 11(6), 2009-2019.
- Setiowati, D., Utomo, W. B., & Agustina, M. (2023). Integration in nursing curriculum for building Islamic nurses' character in Indonesia: a descriptive qualitative approach. *Healthc. Low-Resource Settings*, 11(2).
- Sudarmanto, E., Aulia, T. Z., Rahman, K., Kaswoto, J., Fatahillah, W., Sadi, S., ... & Yuniarti, R. (2025). *Good University Governance*. Minhaj Pustaka.
- Sukarno, S. A., Budiarto, A., & Fadrial, M. (2024). Pemetaan Citra 3D Untuk Perencanaan Kota Berbasis Fotogrametri Menggunakan Kamera dan Raspberry Pi. *JTT (Jurnal Teknologi Terapan)*, 10(1), 28-36.